

Analisis Peran Stakeholder dalam Pengembangan Agropolitan Kabupaten Kutai Kartanegara

Maulida Rachmalia Dewi¹, Hikmah Dwi Nurfani², Anisa Nur Aisyah Borneo³, Risnayanti Arung⁴

¹Department of Urban and Regional Planning, Civil and Planning Engineering, Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan. Email : 08161041@student.itk.ac.id

²Department of Urban and Regional Planning, Civil and Planning Engineering, Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan. Email : 08161031@student.itk.ac.id

³Department of Urban and Regional Planning, Civil and Planning Engineering, Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan. Email : 08161011@student.itk.ac.id

⁴Department of Urban and Regional Planning, Civil and Planning Engineering, Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan. Email : 08161069@student.itk.ac.id

Abstract

The Agropolitan area is expected to be one of solution for regional economic development that will be followed by sustainable economic growth. However, it requires some supports from the stakeholders. Stakeholders are groups or individuals that can influence or are influenced by the achievement of certain goals, which in this case is the development of agropolitan areas. This study aims to identify and mapping the stakeholders based on their influence and interests - in developing the agropolitan area of Kutai Kartanegara Regency. The identification and analysis is needed to be done to know the consequences and implication that must be considered in planning of programs and activity. The stakeholder that involved in agropolitan area consists of primary stakeholders, key player of stakeholders and secondary stakeholders. Primary stakeholders are the community of Kutai Kartanegara Regency which includes 10 Districts with Agropolitan potential and Farmers' Groups in that 10 Districts. Key stakeholders are UPT, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kutai Kartanegara, and secondary stakeholders include external parties.

Keywords : Agropolitan, Development, Stakeholder

Abstrak

Pengembangan kawasan agropolitan diharapkan dapat menjadi solusi pengembangan ekonomi wilayah yang akan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun pengembangan membutuhkan support dari pemangku kepentingan (stakeholder). Stakeholder adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu yang dalam hal ini ialah pengembangan kawasan agropolitan. Dalam penerapannya stakeholder dapat memberi dampak ataupun terdampak terhadap suatu perencanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepentingannya masing-masing dalam pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Kutai Kartanegara. Identifikasi dan analisa ini diperlukan untuk menelaah konsekuensi dan implikasi yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan rencana program maupun kegiatan. Stakeholder dalam pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari stakeholder primer, stakeholder kunci dan stakeholder sekunder. Stakeholders primer meliputi Warga Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi 10 Kecamatan dengan potensi Agropolitan dan Kelompok Tani di 10 Kecamatan dengan potensi agropolitan. Stakeholders kunci meliputi UPT, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai unsur perangkat daerah dan Stakeholders sekunder meliputi pihak eksternal.

Kata kunci : Agropolitan, Pengembangan, Stakeholder

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 banyak menjelaskan mengenai potensi pertanian di wilayahnya. Hal tersebut didukung dengan strategi penataan ruang bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara menjadikan pemantapan fungsi Kabupaten sebagai pusat pengembangan pertanian dan pariwisata sebagai strategi penataan ruangnya. Salah satu rencana yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendukung strategi penataan ruangnya dalam lingkup waktu perencanaan dokumen RT/RW Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pengembangan optimalisasi kawasan peruntukan pertanian meliputi pengembangan kawasan peruntukan pertanian, peningkatan produktivitas, diversifikasi dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pengembangan sistem pemasaran hasil pertanian. Berdasarkan potensi tersebut perlu dilakukan konsep pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Konsep ini diharapkan dapat menjadi solusi pengembangan ekonomi wilayah yang akan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun dalam perwujudan konsep pengembangan kawasan agropolitan perlu melibatkan banyak pemangku kepentingan atau *stakeholder*.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) *stakeholder* adalah pihak yang memiliki kepentingan (pemangku kepentingan) baik individu, atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan terhadap organisasi atau isu/permasalahan yang sedang diangkat. Pelibatan *stakeholder* ini sangatlah penting sebagai bahan pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan dalam perencanaan pengembangan dikarenakan *stakeholder* adalah pihak yang akan memberi dampak ataupun terdampak dalam suatu rencana. Dalam tulisannya "*Stakeholder Theory*", Wahyudi (2015) menjelaskan bahwa sebuah organisasi atau isu/permasalahan dipengaruhi oleh semua *stakeholder* yang terkait, oleh karena itu dalam pengambilan keputusan harus memberikan keuntungan atau tidak merugikan semua *stakeholder* yang berpengaruh. Guna mewujudkan terciptanya keputusan yang adil bagi semua *stakeholder* maka pelibatan semua pihak (*stakeholder*) amat sangat penting. Pelibatan pihak *stakeholder* didasarkan kepada peran dan fungsi serta besar/kecilnya pengaruh dari masing-masing *stakeholder*. Oleh karena itu dianggap penting untuk melakukan identifikasi *stakeholder* mana saja yang akan berperan dan berkepentingan terhadap rencana pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tingkatan pengaruh dan perannya. Identifikasi dan analisa ini diperlukan untuk menelaah konsekuensi dan implikasi yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan rencana program maupun kegiatan agar tercipta suatu perencanaan yang dapat memberi jalan terbaik bagi semua *stakeholder*.

1.2. Tujuan

Tujuan penelitian ini ialah mengidentifikasi dan memetakan *stakeholder* berdasarkan pengaruh dan kepentingannya masing-masing dalam pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Metodologi

2.1. Kebutuhan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian berupa variabel yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Stakeholder yang terkait dengan agropolitan

Untuk melakukan identifikasi *stakeholder* yang berkaitan dengan agropolitan Kabupaten Kutai Kartanegara, dilakukan pengumpulan data sekunder dan primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perencanaan dan pengembangan agropolitan. Data primer didapatkan dari observasi lapangan pada wilayah kajian yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Peranan dan posisi masing-masing stakeholder

Peranan dan posisi masing-masing *stakeholder* diidentifikasi menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh dari observasi lapangan dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen agropolitan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi instansi terkait yang termasuk dalam *stakeholder*.

2.2. *Populasi dan Sampel*

Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah kelembagaan serta masyarakat. Adapun sampel diambil menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria berupa instansi dan masyarakat yang bersangkutan dengan pengembangan agropolitan di Kutai Kartanegara. Sampel *stakeholder* yang diambil yaitu warga desa, kelompok tani dan ternak, unit teknis pelaksana teknis dinas (pertanian perkebunan, peternakan), Dinas Pertanian tanaman pangan dan hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas peternakan dan kesehatan hewan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan pengujian kendaraan bermotor, PDAM, dan PT.PLN UP3B Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.3. *Metode Analisis*

Teknik analisis memakai metode analisis *stakeholder* dengan melakukan pendefinisian *stakeholder* primer, *stakeholder* kunci, dan *stakeholder* sekunder atau pendukung. / lembaga pemegang kepentingan berdasarkan penelitian Nugroho (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk dan Handayani (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Peran *stakeholders* dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang yang mengelompokkan *stakeholders* dalam suatu rencana pengembangan menjadi tiga kelompok.

Dalam penelitian, analisis *stakeholder* dimulai dengan melakukan identifikasi *stakeholder* yang berhubungan dengan perencanaan dan pengembangan kawasan agropolitan pada wilayah kajian Kabupaten Kutai Kartanegara beserta tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan dalam peranan dan posisi masing-masing instansi ataupun individu yang diperkirakan dapat menjadi *stakeholder* bagi pengembangan kawasan agropolitan. Setelah itu, dilakukan analisis *stakeholder* dengan menjabarkan pengaruh dan kepentingan dari *stakeholder* yang telah diidentifikasi tersebut. Dari tingkat pengaruh dan kepentingan, kemudian masing-masing instansi atau individu *stakeholder* dikelompokkan ke dalam kelompok *stakeholder* primer, *stakeholder* sekunder maupun *stakeholder* kunci.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 *Identifikasi Stakeholder*

Stakeholder dalam pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari *stakeholder* primer, *stakeholder* kunci dan *stakeholder* sekunder. Menurut Maryono, 2005 dalam Yosevita, 2015, *Stakeholders* primer merupakan *stakeholder* yang terkena dampak positif maupun negatif secara langsung dan memiliki keterkaitan langsung pula dengan suatu kegiatan. Dalam penelitian ini, *stakeholders* primer meliputi Warga Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi 10 Kecamatan (Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Tabang, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Loa Janan dan Kecamatan Muara Kaman) dengan potensi Agropolitan dan Kelompok Tani di 10 Kecamatan dengan potensi agropolitan. Kegiatan pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Kutai Kartanegara menimbulkan dampak positif antara lain :

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan warga sekitar kawasan agropolitan.
2. Adanya distribusi bahan pangan hingga keluar kota.
3. Keterlibatan warga dalam kegiatan pertanian melalui rapat kelompok tani yang membahas terkait permasalahan pertanian yang terjadi saat itu.

Menurut Maryono, 2005 dalam Yosevita, 2015, *stakeholders* kunci merupakan *stakeholders* yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana pengembangan. *Stakeholders* kunci meliputi UPT. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sebagai unsur perangkat daerah yaitu memiliki tugas salah satunya melaksanakan penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten. Kemudian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kutai Kartanegara.

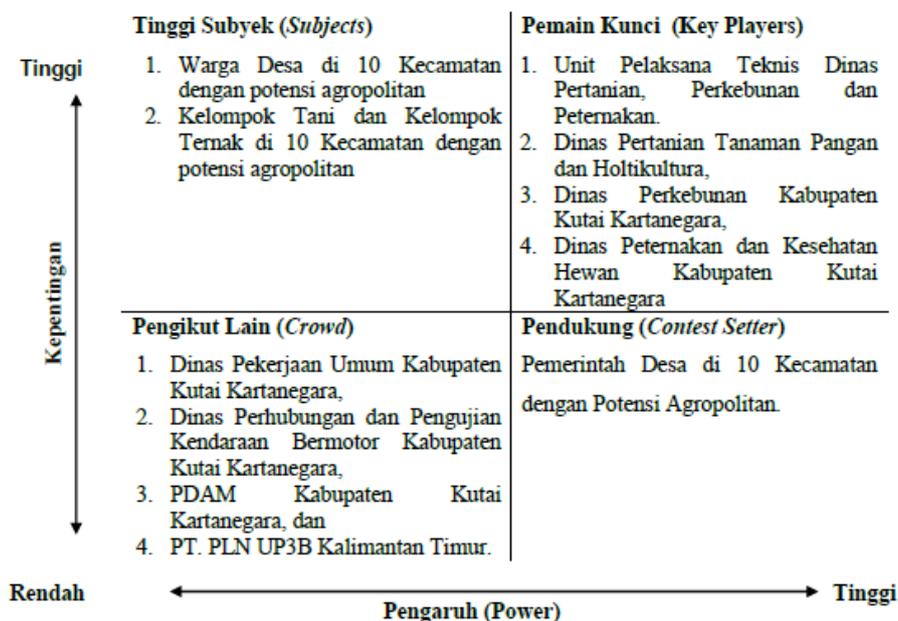
Stakeholders sekunder menurut Maryono, (2005) dalam Yosevita, (2015) meliputi pihak eksternal yang tidak memiliki kepentingan secara langsung tetapi menjadi pendukung atau fasilitator dalam pengembangan suatu rencana. *Stakeholders* sekunder antara lain Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Perhubungan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kutai Kartanegara, PDAM Kabupaten Kutai Kartanegara, dan PT. PLN UP3B Kalimantan Timur.

3.2. Identifikasi Peran Stakeholder

Pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh peran *stakeholder* internal yaitu *stakeholder* primer dan kunci yang memiliki peran sebagai pelaksana, koordinator, implementator, pendamping dan fasilitator. Sedangkan, *stakeholders* eksternal mencakup *stakeholders* sekunder atau pendukung yang berperan sebagai fasilitator.

3.3. Pemetaan Stakeholder dalam Pengembangan Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara

Pemetaan *Stakeholders* dalam Pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki pengaruh dan kepentingan yang berbeda-beda.



Gambar 1. Pemetaan *Stakeholders* Berdasarkan Tingkat Pengaruh dan Kepentingan Terhadap Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Kutai Kartanegara

Sumber: Olahan Penulis, 2019

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, pemain kunci dengan tingkat kepentingan dan pengaruh tinggi antara lain adalah UPT Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunanserta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sementara itu, *stakeholder* dengan tingkat kepentingan yang tinggi namun memiliki pengaruh yang rendah diantaranya adalah warga desa pada wilayah kajian serta kelompok tani dan kelompok ternak pada wilayah kajian. Kemudian, *stakeholder* pendukung dengan tingkat pengaruh yang tinggi, namun memiliki kepentingan yang rendah yaitu Pemerintah Desa pada wilayah kajian. Yang terakhir, pengikut lain dengan tingkat pengaruh dan kepentingan yang rendah antara lain adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan Pengujian Kendaraan Bermotor, PDAM dan PLN. Kemudian, secara lebih detail, identifikasi dan peran *stakeholders* dalam pengembangan kawasan agropolitan di wilayah kajian yang terbagi menjadi *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementator dan akselerator dengan mengacu pada Nugroho (2014) yaitu sebagai berikut.

Tabel 1: Hasil Identifikasi dan Peran *Stakeholders* Primer dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Kutai Kartanegara

Analisis Peran Stakeholder dalam Pengembangan Agropolitan Kabupaten Kutai Kartanegara

| <i>Stakeholder Primer</i> | <i>Peranan/ posisi</i> | <i>Kegiatan Terkait Peran</i> | <i>Analisis Penilaian</i> |
|---------------------------|------------------------|---|--|
| Warga | Implementator | Terlibat dalam kegiatan pengembangan kawasan agropolitan | Warga desa yang tidak termasuk dalam kelompok tani melakukan kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan tanpa bantuan pemerintah. |
| Kelompok Tani dan Ternak | Implementator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlibat dalam peserta kegiatan penyuluhan dan pelatihan terkait pertanian, perkebunan dan peternakan. 2. Melakukan menanam, memberi bibit, memanen, dan menjual hasil panen. | Warga desa yang termasuk ke dalam kelompok tani merupakan pelaksana dari kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan. |

Sumber : Olahan Penulis, 2019

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa terdapat peran *stakeholder* primer sebagai implementator dari rencana yang ada. Warga dan kelompok tani dan ternak terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan agropolitan di Kutai Kartanegara. Kelompok tani dan ternak melakukan kegiatan seperti pelatihan, melakukan penanaman, dan menjual hasil panen sebagai hasil perwujudan rencana.

Tabel 2: Hasil Identifikasi dan Peran *Stakeholders* Kunci dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Kutai Kartanegara

| <i>Stakeholder Kunci</i> | <i>Peranan/ Posisi</i> | <i>Kegiatan Terkait Peran</i> | <i>Analisis Penilaian</i> |
|--|------------------------|--|---|
| UPT. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan | Koordinator | koordinator antara masyarakat dengan pemerintah terkait program pertanian, perkebunan dan peternakan | UPT. Berperan sebagai ‘jembatan’ dalam menyampaikan program dan aspirasi terkait bantuan dan permintaan ke pemerintah. |
| | Fasilitator | Terlibat sebagai penyalur bantuan serta pemateri dalam melakukan penyuluhan kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan. | UPT. di tiap kecamatan berperan sebagai pemateri dalam tiap kegiatan penyuluhan. Serta penyalur bantuan pertanian, perkebunan serta peternakan dari bantuan pemerintah. |
| Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kutai Kartanegara | Koordinator | Terlibat sebagai koordinator antara dinas dengan UPT. pada tiap kecamatan | Dinas terkait menyediakan bantuan dan penyusunan program yang kemudian disalurkan melalui UPT. Dinas juga menyediakan pelatihan terkait penyediaan pemateri dalam melakukan penyuluhan. |
| | Fasilitator | Terlibat dalam memfasilitasi dan mencukupi yang dibutuhkan oleh kelompok tani dan kelompok ternak. | Mengajukan permohonan bantuan terkait pertanian, perkebunan dan peternakan, |
| | <i>Policy Creator</i> | Dinas terkait berperan dalam penyusunan kebijakan dan program untuk menunjang pertanian, perkebunan dan peternakan. | Wewenang dalam penyusunan program pertanian, perkebunan dan peternakan diberikan ke dina. |

Sumber : Olahan Penulis, 2019

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa peran *stakeholders* kunci ada yang sebagai koordinator, fasilitator dan pembuat kebijakan. Dalam hal ini, *stakeholder* kunci merupakan *stakeholders* yang berperan besar untuk mendukung keberhasilan rencana pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dapat dilihat bahwa peran *stakeholders* kunci yang dapat menjadi koordinator antara pemerintah dengan masyarakat maupun dengan UPT. Memiliki peran sebagai fasilitator dalam mencukupi kebutuhan *stakeholder* primer dan sebagai pembuat kebijakan untuk menyusun program dalam menunjang pertanian, perkebunan dan peternakan. Sebagai perpanjangan

Analisis Peran Stakeholder dalam Pengembangan Agropolitan Kabupaten Kutai Kartanegara

tangan antara pemerintah dan masyarakat dapat melalui UPT. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, sehingga, menjadikan UPT tersebut menjadi *stakeholder* kunci.

Tabel 3: Hasil Identifikasi dan Peran *Stakeholders* Sekunder dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Kutai Kartanegara

| <i>Stakeholder</i> Sekunder | Peranan/ Posisi | Kegiatan Terkait Peran | Analisis Penilaian |
|---|-----------------|--|---|
| Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Perhubungan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kutai Kartanegara, PDAM Kabupaten Kutai Kartanegara dan PT. PLN UP3B Kalimantan Timur. | Fasilitator | Terlibat dalam memfasilitasi dan mencukupi yang dibutuhkan oleh kelompok tani dan kelompok ternak dalam memenuhi kebutuhan pertanian, peternakan dan perkebunan di tiap kecamatan. | Dalam hal ini, dinas serta instansi terkait membangun sarana serta prasarana untuk menunjang kehidupan masyarakat di tiap kecamatan sehingga, secara tidak langsung membantu dalam pemenuhan kegiatan pertanian, perkebunan serta peternakan. |

Sumber : Olahan Penulis, 2019

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa *stakeholder* sekunder memiliki peran dalam keterlibatan untuk mendukung kegiatan yang dilakukan *stakeholder* primer. Keterlibatan *stakeholder* sekunder berupa keterlibatan secara tidak langsung dalam membantu pemenuhan kegiatan pertanian, perkebunan serta peternakan di kawasan agropolitan Kutai Kartanegara.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil, pemain kunci dengan tingkat kepentingan dan pengaruh tinggi antara lain adalah UPT Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunanserta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sementara itu, *stakeholder* dengan tingkat kepentingan yang tinggi namun memiliki pengaruh yang rendah diantaranya adalah warga desa pada wilayah kajian serta kelompok tani dan kelompok ternak pada wilayah kajian. Kemudian, *stakeholder* pendukung dengan tingkat pengaruh yang tinggi, namun memiliki kepentingan yang rendah yaitu Pemerintah Desa pada wilayah kajian. Yang terakhir, pengikut lain dengan tingkat pengaruh dan kepentingan yang rendah antara lain adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan Pengujian Kendaraan Bermotor, PDAM dan PLN.

Daftar Pustaka

- _____. Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di: <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>. Diakses 14 Maret 2020.
- Handayani, Fitri dan Hardi Warsono (2017) 'Analisis Peran *stakeholders* dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang', *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 6, No. 3
- Latupapua, Yosevita. (2015) 'Implementasi Peran Stakeholder dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Manusela (TNM) di Kabupaten Maluku Tengah', *Jurnal Agroforestri*, Vol. X, No. 1
- Nugroho, Hermawan Cahyo. Soesilo Zauhar dan Suryadi (2014) 'Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk', *Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari*, Vol. 05, No.1
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. (2013) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013.*Rencana Tata Ruang Wilayah Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033*. Kutai Kartanegara..
- Wahyudi, Dudi. 2015. Analisis Empiris Pengaruh Aktifitas Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. Proceeding Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional ke-2 Ikatan Widyaaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Banten Pandeglang, 3 – 4 Desember 2015.